

**MERUNUT IDENTITAS ISLAM INDONESIA**  
**(Kajian Historiografi Menurut Ulama Kontemporer**  
**Yogyakarta, Perspektif Muhammadiyah,**  
**NU, HTI, dan MMI)**

Himayatul Ittihadiyah

*Abstract*

*Self identification is a preliminary phase of the process of birth the historical consciousness of mankind, it is an attempt to understand by critical perspective about the self. The important of this discussion is, not only to answer the question about what the meaning of identity, but also to think about how to gain anything beside the meaning of identities. The subject matter of this research was the opinion and the perception about "The Identity of Indonesian Islam" according to Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), and Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) in Jogjakarta. This research is the qualitative research that was trying to present the discussion that hope will be create a critique consciousness, it was not a reactive consciousness that appeared to face the external context but the creative consciousness that developed in the basis of autonomic independent thought. By the Derrida's deconstruction and oral history method this discussion was trying to pursue the identities that adhered to the Moslem organizations in Indonesia according to how do they talked about themselves. The result found from this research are, firstly, it was not equal perception to the subject. Muhammadiyah and NU accepted the subject as the critical discourse, but HTI and MMI rejected the subject as a neutral discourse because that was created by American or the colonial perception, like moderate Islam, modern Islam, humanist Islam, tolerant Islam etc. as represented of "Indonesian Islam identity". Secondly, According to Muhammadiyah and NU, it was*

*more important to expose the Indonesian identity than the Islam identity ones, but to HTI and MMI, the Islam identity was more important to expose than ones.*

**Keywords:** *Identitas Islam, Organisasi Islam, Ulama Kontemporer*

## I. Pendahuluan

Dalam wacana poskolonial, identitas merupakan salah satu kata sensitif yang sering memunculkan persoalan. Ciri-ciri, simbol, karakter, dan eksistensi adalah sejumlah kata identik yang semakna dengan istilah identitas. Ketika berdiri sendiri kata ini tidak tampak mempunyai tendensi apapun, namun ketika dikonstruksikan dalam sebuah tema, “Identitas Islam Indonesia” ternyata dapat memunculkan makna-makna tertentu yang dianggap bertendensi sehingga memunculkan reaksi berupa kritik dan penolakan. Dalam bacaan para tokoh organisasi Islam Indonesia, yang menjadi subyek dari penelitian ini, istilah tersebut menjelma dalam persepsi yang berbeda antara satu sama lain.

Sebagai konsekuensi dari pendekatan dekonstruktif, tema penelitian inipun menerima dekonstruksi dari subyek penelitian. Sebagian dari mereka menolak tema “Identitas Islam Indonesia” sebagai tema tendensius yang mengandung muatan ideologi sekuler. Sedangkan sebagian yang lain menerimanya sebagai sebuah wacana kritis. Alasan penolakan ternyata disebabkan oleh bias pemaknaan yang dibaca dari konsep “Islam moderat, Islam modernis, atau Islam humanis, dan sebagainya” yang selama ini mereka sebut sebagai identitas palsu, atau identitas yang disematkan oleh ideologi Barat yang anti Islam.

Sejumlah pengamat dunia, memang pernah mengapresiasi tentang watak atau karakteristik Islam di kawasan ini sebagai Islam yang damai, ramah, dan toleran, yang mencirikan Islam-Melayu sebagai Islam yang dapat diharapkan untuk masa depan. Dampak dari wacana ini, walaupun di satu sisi melahirkan optimisme, tampaknya di sisi lain justru memunculkan kecurigaan. Mereka yang bersikap positif, dituduh sebagai kolonialis karena dianggap mengikuti skenario kaum kolonial yang berideologi sekuler, sebaliknya mereka yang bersikap negatif curiga terhadap sejumlah pengamat yang sebagian besar dari Barat, yang menyematkan identitas Islam-Melayu yang toleran, damai, dan akomodatif. Apresiasi tersebut dibaca sebagai formulasi pemikiran Amerika yang bermaksud membentuk identitas-identitas baru tersebut

dengan tujuan agar mudah dikendalikan. Demikian pula sebaliknya, komunitas Islam yang bersikap positif menganggap komunitas yang lain sebagai Islam yang dipengaruhi oleh arabisme, berfikir tekstualis, literalis yang oleh karenanya menjadi fundamentalis.

Demi membaca ilustrasi di atas, maka penelitian ini bisa menjadi bahan otokritik bagi umat muslim Indonesia yang ingin menemukan identitasnya secara merdeka. Dalam hal ini para tokoh organisasi Islam patut dimintai perspektifnya untuk mengambil peran, mengurai persoalan identitas, baik menyangkut eksistensi umat dalam konteks ke-Islam-an maupun ke-Indonesia-an. Bagaimanakah cara para tokoh organisasi Islam tersebut menjelaskan persoalan “Identitas Islam Indonesia” yang belum selesai ini?

Untuk mendewasakan kesadaran atas kedirian bangsa pascakolonial seperti Indonesia ini tampaknya diperlukan sebuah kesadaran dekonstruktif. Dalam wacana Gayatri C. Spivak, masyarakat Muslim Indonesia, dapat dikategorikan sebagai masyarakat “*subaltern*” yang terbiasa direpresentasikan oleh yang lain, oleh karenanya untuk proses penemuan identitas diri, para tokoh organisasi Islam akan diminta untuk menjawab tantangan Spivak, sebagaimana judul karyanya “*Can the Subaltern Speak?*” (Spivak, 1988: 271-313). Pertanyaan Spivak dengan demikian diterjemahkan menjadi “Mampukah masyarakat Muslim Indonesia bicara—melalui para tokohnya—menjelaskan persoalan “Identitas Islam Indonesia?” Bagaimanakah cara mereka menjelaskan konsep diri, tidak hanya sebagai umat yang beragama Islam, tetapi juga berbangsa Indonesia, berbudaya lokal, dan berwacana dengan isu-isu global yang bersifat trans-nasional.

Menyadari kebiasaan direpresentasikan oleh bangsa lain selama kurang lebih 350 tahun menyebabkan bangsa Indonesia harus banyak belajar menjadi merdeka demi menemukan identitas diri yang sebenarnya dengan bertanya: Adakah Sistem pengetahuan inferior masih terus mentradisi? Masihkah kecenderungan mengidentifikasi diri dan mengidentitaskan yang lain lebih dominan dipengaruhi oleh keberadaan asing dibanding mempertimbangkan keberadaan diri secara merdeka?

Dengan meminjam cara dekonstruksinya Jacques Derrida (Norris, 2006: 17-21), penelitian ini berupaya menyajikan diskusi perspektif mengenai “Identitas Islam Indonesia” menurut organisasi-organisasi Islam Indonesia yang ada di Yogyakarta melalui para tokoh intelektualnya, representasi dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majlis Mujahidin Indonesia (MMI). Sebagai

kajian historiografi penelitian ini mencoba melacak, kemudian menyajikan identitas berdasarkan cara mereka memahami sejarah mereka sendiri dan memposisikan perspektif mereka secara sejajar.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang berkeinginan untuk menyajikan historiografi (Rosenthal, 1985: 65) Untuk menghasilkan historiografi dekonstruktif, diperlukan metode sejarah lisan atau *oral history*. (Asvi Warman Adam, 2000: xix-xxiii). Penelitian ini pun berupaya memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari para Ulama, sebagai subyek penelitian, berupa pandangan-pandangan dan konsep-konsep melalui wawancara semi terstruktur secara langsung guna memperoleh pandangan-pandangan yang bersifat spontan.

Melalui paradigma dekonstruksinya Derrida, bahwa metafisika kehadiran (*physics of presence*) adalah asumsi bahwa sesuatu yang bersifat fisik (penanda) dan melampaui fisik (petanda) dapat hadir secara bersamaan, dan hal itu hanya mungkin dalam dunia lisan (tuturan) bukan tulisan, oleh karenanya wawancara adalah satu-satunya metode yang dapat menghadirkan dunia lisan sejajar dengan dunia tulisan yang selama ini begitu dominan.

Wawancara dalam hal ini tidak didasarkan kepada pedoman pertanyaan-pertanyaan terstruktur, tetapi hanya perlu menghadirkan tema dan beberapa konsep atau perspektif yang selama ini berlaku dalam dunia tulisan atau wacana dalam dunia teks yang selama ini berlaku. Dunia teks dalam hal ini adalah tentang "Identitas Islam Indonesia" yang kemudian meluas dalam bentuk kehadiran di dunia teks yang lain dalam wacana identitas Islam moderat, humanis, moderen, ataupun fundamental hingga liberal. Penelitian ini hanya perlu melibatkan para informan dalam bentuk kehadiran di dunia lisan melalui wawancara, maka jadilah sebuah historiografi perspektif, yang disusun berdasarkan metode sejarah lisan sebagai tandingan dari metode memahami teks dalam dunia tulisan secara *verstehende*.

Walaupun pada akhirnya dunia lisan atau tuturan akan hadir dalam bentuk dunia tulisan yang mendominasi wacana, akan tetapi paradigma dekonstruktif pada gilirannya akan kembali mendekonstruksi dengan kehadirannya melalui dunia tuturan yang anti dominasi dan anti kemapanan kepada klaim-klaim atas nama kebenaran obyektif. Dalam bentuk praktis, metode penelitian ini dapat dijelaskan dalam dua langkah saja, yakni:

1. Menghadirkan dunia teks berupa “Identitas Islam Indonesia” ke hadapan para informan, agar menyampaikan perspektifnya secara langsung tentang wacana tersebut dalam bentuk dunia lisan atau penuturan sebagai alat untuk mendekonstruksi wacana yang sudah berlaku di dunia tulisan, sebagaimana yang selama ini mewacana di dunia teks.
2. Menyampaikan perspektif para informan dari bentuk lisan ke dalam bentuk tulisan secara sejajar. Artinya antara kehadiran dalam bentuk tulisan dan kehadiran dalam bentuk lisan merupakan dua kekuatan yang sejajar untuk saling mengkritik, tanpa mendominasi antara satu sama lain.

### **III. Hasil dan Analisis**

#### **1. Identitas Islam “Melayu” dalam Setting Historiografi Islam Indonesia**

##### **1.1. Historiografi Islam Indonesia Pra-kolonial**

Secara historis istilah Melayu adalah sebuah konsep yang menunjuk kepada satu entitas budaya yang ada pada suatu wilayah geografis tertentu yang sampai sekarang posisi atau lokasi tepatnya masih terus menjadi wacana sejarah. Walaupun asal dan arti nama itu belum dapat dipastikan namun istilah Melayu sendiri telah berkembang dalam berbagai wacana yang sangat meluas. Bahasa Melayu, budaya Melayu, hingga identitas tertentu yang menunjuk kepada budaya-budaya yang dapat dimaknai sebagai Melayu. Dalam catatan historiografi Islam Indonesia pra-kolonial kata Melayu lebih sering merujuk kepada Kerajaan Melayu atau Bandar Melayu. Ada juga yang mencoba menghubungkan dengan pegunungan Malaya, akan tetapi sampai sekarang wacana tersebut juga masih dalam status praduga. Walaupun demikian pada umumnya Melayu disepakati terletak di daerah kota Jambi yang sekarang.

Dalam berita Tionghoa dari tahun 644 atau permulaan 645 disebutkan tentang kerajaan Mo-lo-yeu (Melayu). Musafir I-tsing menyebut Melayu sebagai kerajaan yang terletak di pesisir selat Malaka, jalan laut yang paling pendek dari Tiogkok ke India. Tidak mengherankan bahwa setelah terjadi lalu lintas antara kedua negeri itu selat Malaka pun menjadi ramai dan Melayu menjadi Bandar terbesar di pesisir selat itu.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia I* (Jakarta:Balai Putaka, 1952), hlm. 29

Kebesaran nama Melayu tampaknya menjadikan nama itu popular dalam sejarah sebagai simbol atau identitas yang melekat kepada hal-hal yang bersifat esensial. Kepopuleran Bandar Melayu pada saat awal masuknya Islam di wilayah ini ternyata juga ikut terabadikan dalam identitas yang melekat kepada karakter Islam yang disebarluaskan secara damai. Karakter damai barangkali menjadi ciri dari metode bagaimana Islam itu disiarkan yang secara kebetulan berasesuaian dengan karakter masyarakat Melayu yang akomodatif dalam menghadapi pengaruh ajaran dan budaya dari luar, termasuk dalam hal ini Islam tentunya. Karena proses itulah tampaknya identitas Islam Melayu terbentuk dalam sebuah cirikhas Islam yang toleran dan moderat. Proses perdagangan sebagai sebuah kegiatan yang sangat memasyarakat sangat mendukung terjadinya proses akulterasi budaya antar berbagai bangsa. Agama Islam yang menurut catatan historiografi Islam Indonesia disebarluaskan melalui perdagangan sangat kondusif untuk diterima secara damai dan akomodatif.

Bukan hal yang aneh jika kemudian citra Melayu yang toleran menjadi identitas yang melekat kepada identitas Islam Indonesia pada masa pra-kolonial atau identitas Islam di Nusantara pada masa kerajaan-kerajaan Islam, karena di masa itulah Islam sedang mulai tumbuh dan berkembang dalam totalitas antara ajaran agama dan kebudayaan masyarakat-masyarakat setempat. Bukan fakta yang ahistoris juga ketika pemandangan dunia luar melihat karakter masyarakat Muslim yang melekat pada identitas Melayu di Nusantara sebagai hal yang eksotik dan menarik perhatian, hingga banyak peneliti asing yang kemudian tertarik untuk melihat kekhasan tersebut secara lebih dekat hingga memunculkan label atau identitas-identitas yang mengambarkan karakter masyarakat Islam Melayu yang toleran dengan sebutan humanis, damai, moderat dan sebagainya.

## 1.2. Historiografi Islam Indonesia Masa Kolonial

Dalam historiografi Islam Indonesia masa kolonial justru paling banyak dibahas tentang identitas Islam Melayu, baik yang mengacu kepada sumber lokal atau sumber kolonial semua mengarah kepada identitas Melayu ketika menyingsingkan masalah Islam di Indonesia. Terlebih lagi ketika membahas masalah awal Islamisasi di Nusantara. Banyak sekali historiografi Islam Indoonesia yang menggunakan identitas Melayu, seperti tema “Islam dan Martabat Raja Melayu” tulisan AC. Milner, “Pengislaman orang-orang Melayu” oleh Mohd. Taib Osman, “Kepercayaan dan Agama Orang Melayu”, oleh R.O. Winstedt, dan “Kaum Muda dan Kaum Tua:

Inovasi dan Reaksi di Kalangan Orang Melayu” oleh William Roff. Karya-karya ini adalah di antara sekian banyak historiografi Islam yang mengacu kepada sumber-sumber kolonial tentang Melayu.

Dalam *Jaringan Ulama*, karya sejarawan Muslim Indonesia, Azyumardi Azra juga cukup banyak menggunakan sumber-sumber historiografi Melayu di samping sumber-sumber yang berada di Timur Tengah. Dia menjelaskan tentang prestasi para Ulama Nusantara Abad 17-18 yang berhasil mendamaikan dan mengharmonisasikan pemikiran-pemikiran Islam yang pernah saling bersitegang antara wacana Islam sufistik dan Islam syari’at dan menjadikan identitas “Islam Melayu” yang neosufistik, sebagaimana terformulasikan dalam organisasi-organisasi tarekat seperti Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah dan lain-lain. Tidak heran jika popularitas Para Ulama Melayu di Makkah sempat terabadikan dalam sebutan *Ashab al-Jawiyyin* untuk menyebut keberadaan mereka. Sebutan *Al-Jawiyyin* pada masa itu identik menunjuk kepada identitas Melayu, di mana huruf *Arab melayu* yang dikembangkan para ulama sebagai alat untuk mengajar agama Islam di Nusantara pada waktu itu juga populer dengan sebutan huruf *Jawi*.

Memasuki masa modernisme, lahirnya Sarekat Dagang Islam (1909) Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912) Sumatra Thawalib (1918), dan juga Nahdlatul Ulama (1926), yang merupakan wujud dari kreatifitas para ulama lokal, menandai berkembangnya identitas-identitas Islam Melayu yang mencoba merespon zaman dalam proses perubahan yang sedang berlangsung.

### 1. 3. Historiografi Islam Indonesia Pasca-kolonial

Dalam historiografi pasca-kolonial, identitas Melayu sudah kurang banyak dikenal. Barangkali hal ini juga bagian dari konsekuensi kemerdekaan dan kedaulatan politik yang telah meresmikan Indonesia sebagai nama untuk menyebut bangsa dan negara ini. Sebutan Melayu dan Nusantara yang dahulu sering dipakai untuk menyebut wilayah kepulauan ini sekarang sudah jarang dikenal kecuali oleh mereka yang gemar membaca pelajaran sejarah. Secara tidak disadari dan disengaja ternyata hal ini cukup memiliki dampak terhadap tercerabutnya pengetahuan kita tentang identitas atau jati diri sebagai sebuah bangsa yang pada dasarnya memiliki kemerdekaan secara otonom.

Pengetahuan tentang Identitas Islam-Melayu yang pernah tercatat dalam sejarah masa lampau kita terkadang dianggap sebagai sesuatu yang sama sekali tidak perlu.

Pengetahuan kita saat ini terlampau dipenuhi dengan pengetahuan tentang masa kini yang sering dianggap sama sekali tidak berhubungan dengan masa lampau. Arus globalisasi yang demikian spektakuler seakan menafikan bahwa pengetahuan tentang masa lampau adalah sesuatu yang memiliki korelasi erat dengan pengetahuan masa kini. Pengetahuan yang dianggap terpenting hanyalah pengetahuan tentang masa kini dan masa depan, sehingga tidak jarang masa lampau justru hanya dimanfaatkan oleh sebagian besar para penguasa oportunistis sebagai alat legitimasi bagi ambisi politik tertentu. Tragedi ini dapat terus berlanjut karena kurangnya pengetahuan tentang masa lampau. Masa lampau bukanlah sekedar koleksi atau daftar ensiklopedik tentang kejadian-kejadian di hari lampau yang hanya dapat dilihat ketika diperlukan untuk membangun ambisi politik baru, tetapi sebagai kekayaan akan kearifan budaya yang tercerita melalui proses penyadaran diri secara kritis.

Dalam catatan historiografi pasca-kolonial, sejumlah pengamat dunia, mulai dari John Esposito, Bruce Lawrence hingga Fazlur Rahman pernah mengapresiasi tentang watak atau karakteristik Islam di kawasan ini sebagai Islam yang damai, ramah, dan toleran. Demikian pula yang pernah dikatakan oleh Thomas W. Arnold, dalam bukunya *The Preaching of Islam* (1980) bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara yang berlangsung secara damai, menghasilkan ciri Islam-Melayu sebagai Islam yang dapat diharapkan untuk masa depan. Dengan membaca tema-tema tersebut sebenarnya cukup memberikan pengetahuan kepada kita tentang masa lampau, tentang bangsa yang tengah berproses, berinteraksi, dan beradaptasi dalam pergaularan kekayaan budaya.

Akan tetapi, kekurangpekaan kita terhadap pentingnya pengetahuan masa lampau mengakibatkan ketidakmampuan penemuan konsep diri sebagai bangsa, yang terjadi justru lebih sering tergelincir ke dalam sudut pandang kepentingan masa kini yang tercerabut dari masa lampau. Wacana identitas Islam Melayu ini memang sempat melahirkan optimisme dan respon positif dari berbagai kalangan baik oleh para pengamat Barat ataupun oleh umat Muslim sendiri di Tanah Air. Namun, efek dari wacana ini bukannya melahirkan kesadaran sejarah tetapi justru memunculkan ketakutan sejarah. Barangkali inilah fenomena poskolonial, ketidaksadaran yang mengidap kepada individu-individu atau kelompok kolektif manusia yang tinggal di wilayah atau negara-negara bekas jajahan. Ketidakmengertian, ambiguitas dan kebiasaan direpresentasikan oleh yang lain mengakibatkan ketidaksadaran sering dipahami sebagai kesadaran itu sendiri.

Wacana “Identitas Islam Indonesia” adalah salah satu wacana poskolonial yang sangat terkait dengan munculnya berbagai istilah untuk menyebut identitas-identitas baru yang merupakan perluasan dari identitas Islam Melayu yang sudah dikenal lebih awal. Identitas yang kemudian muncul dalam istilah moderat, toleran, damai dan sebagainya adalah ciri yang ada pada historiografi pasca-kolonial ketika menyebut identitas Islam Indonesia. Sistem pengetahuan poskolonial tampaknya telah menyebabkan istilah-istilah yang menunjuk kepada identitas tersebut kemudian memunculkan pandangan yang multiperspektif dalam masyarakat Islam di Indonesia.

## 2. Identitas Islam Indonesia dalam Wacana Kritis Ulama Kontemporer Yogyakarta

### 2.1. Identitas Visual dan Identitas Sosial

Dalam komunitas masyarakat manapun penggunaan identitas hampir menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, terlepas dari pemaknaan yang mereka maksudkan dengan identitas yang mereka pilih atau kenakan. Menurut subyek penelitian ini, identitas juga merupakan hal yang penting. Walaupun nilai penting yang dijelaskan seringkali kontekstual namun tidak satupun dari mereka beranggapan bahwa identitas itu bukan sesuatu yang penting.

Ulama HTI dan MMI hanya dapat menerima identitas Islam sebagai simbol atau sesuatu yang menunjukkan cirikhas yang dapat dilihat secara visual sebagai tanda pengenal diri, seperti halnya bentuk bangunan, model pakaian, dan wujud fisik lainnya. Sebaliknya, mereka menolak identitas dalam konsep sosiologis seperti Islam moderat, Islam modernis, Islam tradisional, Islam liberal dan sebagainya. Menurut mereka hal itu adalah identitas yang harus ditolak karena menjadi penyebab terpecah belahnya umat Islam. Sedangkan ulama Muhammadiyah dan NU tidak mempersoalkan identitas Islam dalam pengertian apapun, baik sebagai simbol visual, maupun identitas sebagai sebuah konsep sosial.

Dalam realitas ke-Indonesia-an, “identitas Islam” menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Identitas yang mana yang perlu ditonjolkan itulah yang menjadi persoalan, apakah ciri universalitas Islam ataukah ciri keindonesiaannya. Ulama Muhammadiyah dan NU dalam hal ini cenderung lebih sepakat untuk menggali identitas berdasarkan konteks keindonesiaannya. Alasannya adalah karena hal itu yang akan menjadi ciri kontekstual Islam Indonesia, yang sesuai dengan budaya

masyarakat Islam Indonesia dan akan membedakan dengan kontekstualitas Islam di negara lain yang memang memiliki budaya yang berbeda, (Danarto, 26 Oktober 2007). Selain itu menjadikan identitas Indonesia yang di dalamnya ada Islam yang bisa mewarnai lebih realistik dari pada menjadikan identitas Islam dunia, di mana di dalamnya ada Indonesia (Machasin: 13 September 2007)

Dalam hal ini keduanya tidak beranggapan bahwa perbedaan budaya dalam diri umat Islam akan menjadi faktor pemecah belah, selama sumbernya tetap sama, yakni Al-Qur'an dan Assunnah. Perbedaan budaya justru akan menjadi kekayaan wacana bagi umat Islam untuk saling memperkaya khazanah keislaman, dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairaat*). Muhammadiyah maupun NU tidak mempersoalkan perbedaan pengertian identitas sebagai simbol budaya yang dapat dilihat secara visual ataupun sebagai konsep sosial. Keduanya merupakan totalitas yang membentuk identitas Islam dalam konteks keindonesiaan yang terus berproses mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai tantangan yang ada.

Adapun Ulama HTI dan MMI, mereka cenderung lebih sepakat mengembangkan identitas Islamnya sebagai ciri universal, bukan ciri Indonesiannya. Identitas yang harus dikembangkan adalah identitas dalam bentuk perilaku yang mencirikan karakter Muslim yang perlu dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk formal. Dalam perspektif Ulama HTI, apa yang selama ini dianggap sebagai proses akulterasi dalam wujud "Islam identitas" sebenarnya merupakan akulterasi yang dipaksakan melalui upaya sekularisasi, bukan realitas sejarah. Jadi identitas yang kemudian mengalami perluasan makna tidak bisa disebut sebagai identitas, tetapi sebuah pemakaian identitas, sebagaimana yang muncul dalam identitas Islam moderat, Islam modernis dan sebagainya. Menurut Ulama HTI, jika umat Islam Indonesia bermaksud kembali kepada jatidiri, maka jatidiri Indonesia yang sebenarnya adalah Islam (Prasetyo, 12 September 2007)

Adapun Ulama MMI tidak secara eksplisit menolak identitas Islam sebagai konsep sosial, tetapi tetap tidak setuju dengan penggunaan identitas-identitas sosial seperti yang selama ini dikenal, karena dianggap sebagai faktor pemecah belah. Menurut MMI umat Islam harus berpegang teguh kepada identitas Islam yang secara universal sudah jelas diatur dalam syari'at Islam, tidak perlu ada relokasi atau kontekstualisasi menurut cara Indonesia yang kemudian dapat membentuk Identitas Islam Indonesia (Syakur, 27 Oktober 2007).

## 2. 2. Identifikasi Diri dan Mengidentitaskan yang Lain

Persoalan lain yang menjadi masalah adalah persoalan siapa yang melakukan identifikasi. Wacana ini dimunculkan oleh Ulama HTI maupun MMI terkait dengan identitas-identitas sosial sebagaimana disebutkan di atas. Munculnya kelompok Islam liberal yang meng-”identifikasi diri” dengan nama Jaringan Islam Liberal (JIL) tampaknya dianggap menjadi penyebab semakin banyaknya persoalan sensitif berupa sentimen kelompok yang kemudian meluas kepada munculnya stereotipe tertentu yang men-stigmatisasi beberapa kelompok organisasi Islam di Indonesia. Yang merasa terstigmatisasi oleh stereotipe negatif dalam kasus ini tentu saja adalah HTI dan MMI.

Konsekuensi dari “identifikasi diri” adalah “mengidentitaskan yang lain”. Dalam pandangan HTI, kelompok pemikir Islam liberal telah melakukan identifikasi diri sebagai Islam Liberal lalu mengidentitaskan yang berseberangan dengan mereka sebagai kelompok Islam fundamental. Hal ini dianggap tidak fair, karena melakukan penyematan stereotipe negatif terhadap yang lain, adalah bentuk upaya stigmatisasi bagi sebagian umat Islam. Dan inilah yang dilakukan komunitas Islam Liberal terhadap HTI (Prasetyo, 12 September 2007).

Dalam mensikapi persoalan identifikasi diri Ulama MMI lebih banyak mengkritik upaya identifikasi diri yang dilakukan oleh semua organisasi Islam di Indonesia. Ia mengandaikan jika identifikasi diri itu dilakukan maka konsekuensinya adalah mengidentitaskan yang lain sebagai *the other*, bukan saudara kita, dan sebagainya. Hal ini menurutnya jelas merupakan sesuatu yang negatif. Ia mencantohkan ketika sebuah organisasi mengidentifikasi diri sebagai Islam modernis maka konsekuensinya ia akan menganggap yang tidak modernis sebagai “*the other*” demikian juga ketika satu organisasi mengidentifikasi diri sebagai Islam moderat, maka yang tidak moderat akan disebut sebagai “*the other*” juga. Padahal dalam tataran aplikasinya perilaku mereka belum tentu mencerminkan identitas yang mereka ciptakan. Jadi menurutnya identifikasi diri dan mengidentitaskan yang lain itu sangat tidak diperlukan (Syakur, 27 Oktober 2007).

Yang memunculkan wacana “diidentitaskan” adalah Ulama HTI, yang dalam hal ini dicantohkan pada pemunculan kata modernis, moderat, humanis, dan lain-lain, yang semuanya merupakan rekayasa Amerika karena ingin memecah belah umat Islam dengan politik *divide et impera*-nya sebagaimana zaman kolonial dulu. Jadi menurut Ulama HTI Umat Islam di Indonesia sengaja “diidentitaskan”

bermacam-macam seperti itu untuk memunculkan kesan bahwa mereka berbeda satu sama lain. Identitas semacam itu diciptakan berdasarkan jarak yang diukur menurut ukuran kedekatan mereka dengan kelompok-kelompok yang dimaksud. Jarak yang paling dekat dengan mereka diidentitaskan sebagai Islam liberal, demokratis, humanis, yang agak jauh diidentitaskan sebagai Islam modernis, kemudian moderat, tradisional dan sebagainya, sedangkan yang paling jauh diidentitaskan sebagai Islam fundamentalis, ekstrimis, dan sebagainya (Prasetyo, 12 Oktober 2007).

Berbeda dengan dua perspektif di atas, Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa identifikasi diri ataupun diidentitaskan bukan sesuatu yang penting untuk diperdebatkan. Yang terpenting adalah bagaimana aplikasinya, jika identitas itu sesuai dengan perilaku maka pasti akan diakui, tetapi jika ternyata tidak ada kesesuaian antara identitas dan perilaku, apakah itu merupakan sebuah identifikasi diri ataupun disematkan oleh pihak lain, sudah pasti hal itu akan ditolak. Identitas itu akan muncul dengan sendirinya menyesuaikan perilaku yang ada, terlepas dari upaya melakukan identifikasi diri ataupun diidentitaskan oleh pihak lain (Danarto, 26 Oktober 2007). Jadi, realitasnya identitas itu melekat pada gerakan yang dilakukan, karena simbol adalah konsekuensi dari gerakan, atau dalam kata lain, gerakan akan menimbulkan label-label atau karakter tertentu yang mengiringinya (Hamami, 29 Oktober 2007)

### **2.3. Pemahaman tentang Konsep “Identitas Islam Indonesia”**

Dalam perspektif Ulama Muhammadiyah, “Identitas Islam Indonesia” sangat diperlukan untuk membedakan dengan Islam yang lain, dalam tataran aplikasinya untuk disesuaikan dengan kultur budaya masyarakat Indonesia, yaitu ajaran al-Qur'an dan Assunnah, yang dicoba diterapkan dalam konteks Indonesia yang budayanya memang berbeda dengan budaya di tempat lain. Identifikasi diri sebagai Islam Indonesia adalah upaya untuk menemukan konsep jatidiri yang sifatnya permanen, seperti halnya identitas organisasi. Berikut ini adalah kutipan langsung dari hasil wawancara dengan Ketua PW Muhammadiyah DIY, Agung Danarto:

“Hingga saat ini masyarakat muslim Indonesia masih terus berproses menemukan identitasnya karena harus berhadapan dengan berbagai pengaruh yang *multidependent*. Ketika masyarakat muslim Indonesia sudah mampu mengeliminasi berbagai pengaruh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka konsep jatidiri atau identitas tersebut akan ditemukan. Jadi tidak bisa ditetapkan lebih dahulu. Ketika identitas itu ditetapkan justru akan ketinggalan zaman atau *out of date*, karena identitas itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan otak manusia. “Identitas Islam Indonesia” yang

toleran, moderat, dan damai harus dipandang sebagai hal positif karena dengan demikian tidak akan menghabiskan energi untuk konflik. Islam yang perlu dikembangkan di Indonesia adalah Islam yang toleran sebagai *ummatan wasathan*".

Adapun Ulama NU lebih banyak memandang persoalan identitas dalam konteks sosial. Berkaitan dengan identitas Islam Indonesia, berikut adalah kutipan langsung hasil wawancara dengan Machasin, Wakil Rois Syuriah PWNU DIY:

"Dalam konteks sekarang ini, "Identitas Islam Indonesia" yang harus dibangun adalah Islam yang *civil*, yang sopan, yang moderat, yang mencoba mengerti orang lain, dan tidak memaksa. Umat Islam Indonesia mempunyai tugas dan hak untuk mewarnai Indonesia, karena Indonesia ini dibentuk oleh sebagian besar umat Islam, maka sangatlah wajar jika umat Islam mengambil peran lebih banyak tetapi bukan berarti menghalangi peran yang lain. Saya mendukung cara beragama yang aktif tetapi tidak meninggalkan kritik yang perlu. Bagi saya lebih mudah membayangkan Identitas Indonesia yang di dalamnya ada Islam yang bisa mewarnai, daripada identitas Islam dunia di mana di dalamnya ada Indonesia, hal ini sangat sulit, karena perekatnya lebih kuat pada budaya Indonesia, daripada ide khilafah yang perekatnya kurang kuat. Walaupun mungkin nanti perkembangannya bisa berbeda, dan itu sebuah pilihan, tetapi pilihan saya lebih kepada berusaha untuk mewujudkan identitas Indonesia yang di dalamnya ada Islam, ini lebih realistik karena tidak didasarkan kepada prinsip keagamaan yang disepakati, itu memang masalah pilihan, tetapi yang penting bagi saya adalah bagaimana membuat Islam itu menjadi berkah bagi Indonesia, maka identitas akan muncul dengan sendirinya, daripada Indonesiannya dibubarkan diganti dengan identitas Islam yang dipaksakan itu akan memunculkan banyak persoalan".

Dalam perspektif Ulama NU yang lain dikatakan, bahwa dalam konteks sekarang ini, menemukan "Identitas Islam Indonesia" adalah sesuatu yang sulit, karena tingkat pluralitas kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang sangat tinggi sehingga representasinya memang ada pada komunitas masing-masing seperti Muhammadiyah, NU, FPI, MMI, HTI, dan lain-lain (Ali, 14 September 2007).

Dalam perspektif Ulama HTI jelas, bahwa walaupun identitas itu diperlukan namun HTI menolak keras konsep "Identitas Islam Indonesia" yang ia sebut sebagai "Islam identitas" buatan Amerika. Menurut HTI, identitas Islam moderat, Islam inklusif, Islam modernis dan lain-lain adalah representasi dari konsep Islam identitas, yang disematkan oleh Barat atau Amerika. Berikut ini adalah kutipan langsung dari hasil wawancara dengan Tindyo Prasetyo, Humas DPD I HTI DIY:

"Berbicara tentang identitas itu ada dua hal, identitas sebagai sebuah pengenal memang merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang, tetapi Islam identitas yang bergulir dalam wacana sekarang ini bukan sekedar itu, Islam identitas dalam pandangan HTI

adalah merupakan sekenario yang hendak dimainkan oleh Amerika. Bahwa ada strategi *divide et impera* yang mereka ciptakan, identitas itu diciptakan berdasarkan jarak yang diukur menurut ukuran mereka. Jarak yang paling dekat disebut Islam sekuleris, jarak yang agak dekat disebut Islam modernis, dan yang jauh itu fundamentalis, lalu dibangunlah persepsi Islam Indonesia itu berbeda dengan Islam Jerman, Islam Timur Tengah, Islam Malaysia dan sebagainya”

Menurut Ulama HTI ini, banyak kalangan Muslim yang tidak sadar akan politik *divide et impera* yang sedang dilakukan Amerika, yakni upaya pemecahbelahan umat Islam melalui isu Islam identitas. Hal ini merupakan rangkaian dari dampak kolonialisme yang terus berlanjut dan bekasnya yang masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dalam masalah ekonomi yang sebenarnya hanya berganti nama aktor saja, jika dahulu kapitalisasi dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda maka sekarang ini hanya berganti nama menjadi IMF, IDB, AUSAID, dan lain-lain yang nama belakangnya adalah Amerika dan Australia.

Dalam perspektif Ulama MMI, identitas merupakan parameter untuk menunjukkan jatidiri seseorang atau organisasi, yang oleh karenanya menjadi sangat penting, tetapi yang harus dibangun adalah identitas Islam bukan identitas-identitas lain yang bersifat verbal sebagaimana klaim yang banyak bermunculan pada saat sekarang ini. Berikut ini adalah kutipan langsung dari hasil wawancara dengan Shobbarin Syakur, Sekretaris MMI mengenai identitas:

“Persoalan identitas dalam konteks perilaku dan simbol yang mencirikan identitas seorang muslim, seperti shalat, puasa, zakat, haji sampai dengan menutup aurat dan sebagainya sebagai ciri yang tetap dan tidak bisa ditawar atau dirubah, atau yang disebut dengan istilah *qurbah*. Jadi tidak bisa dikontekstualisasikan dengan wilayah, seperti tata cara shalat, zakat, puasa dan hajipun tetap, tidak bisa dibedakan atau dikontekstualisasikan, tidak ada shalat dan haji cara Indonesia ataupun cara negara-negara lain yang berbeda-beda. Kemudian ada istilah *tha'ah*, yakni kebutuhan naluri dalam kebutuhan masyarakat atau keluarga, tetapi diatur oleh syariat Islam. Ini juga menjadi identitas Islam, yakni sesuatu yang diatur sedemikian rupa yang tidak bisa dirubah, seperti tata cara mandi junub adalah tata cara yang tidak bisa diubah. Yang ketiga adalah yang diserahkan kepada umat untuk mengeksplorasi sendiri, seperti cara berpakaian umat muslim, modelnya bisa bermacam-macam tetapi tetap harus menutup aurat”.

Terkait dengan konsep identitas Islam Indonesia, ia mempertanyakan, apakah Islam di sini dipahami sebagai budaya atau Islam sebagai syariat Allah. Ketika Islam dipahami sebagai budaya maka sangat dimungkinkan adanya Islam Indonesia, Islam Amerika dan sebagainya, akan tetapi hal itu bukan merupakan identitas Islam. Jadi tidak tepat ketika ada upaya untuk merelokasi Islam. Menurut dia ini adalah

penyebab pemecah belah umat Islam, sebagaimana nasionalisme memecah belah antar Indonesia dan Malaysia, yang penduduknya sama-sama mayoritas Islam. Untuk mempersatukannya umat Islam harus berpegang teguh kepada tali Allah, yakni Syar'iat Islam sebagai kata kunci.

Menanggapi isu "Identitas Islam Indonesia" sebagai Islam moderat, toleran, dan sebagainya, hal ini disebutnya sebagai usaha atau *grand design* dari pihak asing untuk memporakporandakan umat Islam. Jadi identitas verbal semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang bersifat propagandis, sebagaimana identitas *Kaum Bersarung* yang pernah dimunculkan sejak 350 tahun Indonesia dijajah negara asing. Baru setelah perang dingin muncul istilah baru, seperti Islam moderat, Islam demokrasi, dan sebagainya.

### 3. Identifikasi Diri Organisasi-organisasi Islam Indonesia

#### 3.1. Muhammadiyah

Muhammadiyah mengidentifikasi diri sebagai sebuah gerakan tajdid, yakni mengaplikasikan ajaran Nabi Muhammad untuk disesuaikan dengan kemoderenan dan keindonesiaaan. Dalam masalah aqidah, ibadah, dan akhlak Muhammadiyah besikap tegas, tetapi untuk aspek muamalah Muhammadiyah melihat sebagai ladang garap ijtihad yang luar biasa. Adapun jika dalam perkembangannya mengalami fluktuasi hal itu dianggap sebagai bagian dari dinamika organisasi, karena tantangan yang dihadapi tiap zaman akan berbeda, maka metodenya pun harus berbeda. Dengan demikian Muhammadiyah tidak akan mengalami disorientasi walaupun zaman berubah. Gerakan tajdid atau purifikasi tetap akan menemukan bentuknya walaupun akan selalu berbeda pada setiap zamannya (Danarto, 26 Oktober 2007).

Terkait dengan identitas organisasi, Muhammadiyah juga mengaku terus berproses, adapun bentuk idealnya ada di dalam Muqaddimah, yang menggambarkan ciri dan kepribadian Muhammadiyah. Dalam mengidentifikasi diri sebagai Islam, Muhammadiyah mencoba menjalankan dan mensosialisasikan ajaran Islam dalam konteks pemahaman Muhammadiyah yang berkeinginan agar Islam yang diterapkan itu sesuai dengan sumber aslinya. Purifikasi sebagai identitas gerakan yang dilakukan Muhammadiyah, adalah memperjuangkan agar Islam menjadi realitas, demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya, dan mengajak sebanyak mungkin umat untuk mengamalkannya (Danarto, 26 Oktober 2007)

Identitas Muhammadiyah sebenarnya bisa bermacam-macam, selain disebut sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah juga bisa disebut sebagai gerakan tabligh, gerakan dakwah, gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, gerakan pendidikan dan sebagainya, yang memang semua dipentingkan pada gerakan. Dengan demikian identitas verbal sebenarnya tidak dipentingkan dalam Muhammadiyah karena label atau simbol akan melekat dengan sendirinya sebagai sebuah konsekuensi setelah ada gerakan yang nyata (Hamami, 29 Oktober 2007).

### 3.2 Nahdlatul Ulama

Dalam konteks sekarang perjuangan NU mungkin tidak lagi menghadapi puritanisme seperti dulu, karena dalam realitasnya sudah terjadi banyak perubahan. Pergaulan sosial dan proses pendidikan yang semakin terbuka, menyebabkan banyak kalangan yang dahulu cenderung puritan sekarang banyak telah mengalami moderasi (Machasin, 13 September 2007). Karena zamannya berbeda maka dalam konteks sekarang ini NU bukan lagi memerangi puritanisme, puritanisme dalam konteks yang dihadapi sekarang lebih identik kepada radikalisme, terutama kekerasan terhadap problem-problem kemasyarakatan (Ali, 14 September 2007)

Dalam persoalan identifikasi diri, NU mengakui selalu muncul dalam dua karakter, sebagai kultur dan sebagai organisasi. Hal ini mungkin sebagai salah satu identitas dalam pengertian ciri dari NU. Ketika menyebut NU maka sebenarnya di dalamnya ada dua hal. Dua karakter tersebut tersebut sebenarnya bisa menjadi kekuatan yang bisa saling mengisi dan saling mengkritik tetapi kadang-kadang justru menjadi kelemahan, karena masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Wajar jika ada pendapat bahwa tanpa organisasipun orang-orang NU tetap bisa eksis. Artinya walaupun organisasi NU bubar kultur NU tidak akan pernah bubar. Secara historis Indonesia tanpa organisasi NU tidak ada masalah, tetapi menjadi masalah kalau tanpa orang-orang NU, karena banyak orang-orang NU yang telah berjuang dan mengambil peran penting dalam menemukan Indonesia (Machasin, 13 September 2007). Organisasi NU sebenarnya hanya penting dalam proses penguatan pemberdayaan masyarakat, tetapi dalam wilayah *grassroot* sebenarnya tidak begitu penting. Walaupun demikian dalam tataran fungsi organisasi NU tetap menjadi penting karena harus bertindak sebagai sumber rujukan formal bagi masyarakat NU (Ali, 14 September 2007)

Walaupun dalam mengidentifikasi diri NU tidak banyak berbicara pada wilayah struktural sebagai organisasi (*jam'iyyah*) ataupun kultural (*jama'ah*), tetapi lebih kepada hubungan di antara keduanya. Barangkali itu juga salah satu identitas NU, yang berbeda dengan organisasi lain, bahwa ada dua karakter sebagai kultur dan sebagai struktur, seperti yang sering diakui oleh NU sendiri sebagai kekuatan tetapi juga kelemahan. Dalam hal ini NU mengkritik diri NU sendiri sebagai organisasi yang kadang-kadang masih tergantung pada figur bukan struktur. Terlepas dari persoalan di atas, hingga saat ini NU masih mengidentifikasi diri sebagai Islam yang moderat, terlihat dari sikap penolakannya terhadap radikalisme dan apresiasinya terhadap melunaknya sebagian golongan Islam yang semula radikal dan puritan kemudian mengalami moderasi.

### **3.3. Hizbut Tahrir Indonesia**

Walaupun Ulama HTI selalu menolak berbagai macam identitas sosial dan mempermasalahkan upaya identifikasi diri, tetapi sebagai sebuah organisasi atau gerakan, Ulama HTI tak pelak juga melakukan identifikasi diri. Ketika dihadapkan kepada pertanyaan siapa sebenarnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ia mengidentifikasi diri sebagai sebuah gerakan pemikiran yang konsen dalam upaya memerdekaan umat Islam dari hegemoni Barat, memerdekaan umat dari keterpurukan dan sekenario Amerika yang ingin menguasai dunia dengan cara memecah belah umat Islam. Oleh karena itu HTI sebagai pemain baru di Indonesia merasa berkewajiban untuk menyadarkan umat Islam yang selama ini secara tidak sadar sudah direkayasa dalam bingkai identitas-identitas palsu seperti Islam moderat, Islam modernis, Islam liberal, dan lain-lain dengan pemasukan akulturas yang disosialisasikan melalui pendidikan sekuler di lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia, termasuk di universitas-iniversitas (Prasetyo, 12 September 2007).

### **3.4. Majlis Mujahidin Indonesia**

Ulama MMI mengidentifikasi diri sebagai gerakan jihad “membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah”, identitas ini menjadi motto MMI”. Sebagai organisasi kontemporer MMI mengakui hanya berkepentingan untuk berjuang menegakkan Syari’at Islam, ketika suatu saat Syari’at Islam sudah bisa ditegakkan dengan benar maka MMI sebagai organisasi bisa jadi bubar karena tidak diperlukan lagi. MMI membedakan diri dengan organisasi lain dalam hal strategi, jika organisasi

lain lebih banyak menggunakan strategi *bottom-up*, MMI mengupayakan strategi *top-down* melalui upaya formalisasi Syari'ah dengan terus mendesakkan agenda tersebut melalui usulan-usulan dan masukan-masukan kepada pemerintah. MMI juga punya sistem kontrol yakni penegakan Syari'at sebagai Khittah, karena Syari'at dalam pandangan MMI tidak pernah multifaitsir, yang ada adalah sedikit perbedaan, tetapi lebih banyak persamaan. MMI juga punya disiplin organisasi yang ketat, maka siapapun yang keluar dari kaidah yang ditetapkan MMI dapat dikeluarkan. Kekuatan kontrol MMI pada *Ahlu al-Hal wa al-Aqd*, pelaksanaan dan konsekuensinya ada pada keterusterangan dan keterbukaan kontrol dari berbagai pihak di luar MMI. Siapapun bebas untuk mengkritik MMI. Dengan cara ini maka MMI punya sistem kontrol yang tetap berjalan. Otoritas Amir di MMI juga tidak sama dengan yang ada pada sistem Khilafah. Amir dalam MMI adalah pemimpin sebuah organisasi atau koordinator *Ahlu al-Hal wa al-Aqd*.

#### IV. Simpulan

"Identitas Islam Indonesia" sebagai sebuah wacana pemikiran ternyata menyimpan beberapa permasalahan bagi sebagian komunitas Islam di Indonesia, terutama sekali terkait dengan pemahaman dan pemaknaan tentang apa yang dimaksud dan dipersepsi sebagai identitas.

Ulama Muhammadiyah dan NU tidak mempersoalkan masalah identitas. Mereka melihat munculnya identitas sebagai sebuah realitas sosial yang wajar. Walaupun konsep identitas itu multi makna tetap bukan merupakan sesuatu yang dianggap sebagai permasalahan, juga tidak menjadi persoalan mengenai siapakah yang melakukan identifikasi, apakah identifikasi diri ataupun diidentitaskan.

Dalam pandangan Ulama HTI dan MMI, identitas adalah sesuatu yang dapat dipermasalahkan, terutama ketika dikaitkan dengan umat Islam di Indonesia. Fokus HTI lebih kepada persoalan "Identitas Islam Indonesia" yang disebut sebagai hasil skenario Amerika yang tidak ingin melihat Islam berkembang sebagai sebuah kekuatan politik, mereka menciptakan identitas-identitas sosial tersebut dengan tujuan mengendalikan. Adapun MMI, lebih fokus kepada masalah konsekuensi yang diakibatkan adanya identitas-identitas di atas yang selama ini dianggap merepresentasikan "Identitas Islam Indonesia". Identitas-identitas tersebut dianggap sebagai faktor pemecah belah karena munculnya klaim untuk mengidentitaskan yang lain yang justru akan menyebabkan perpecahan.

Akhirnya, penelitian ini tidak berkepentingan untuk membuat pemetaan mengenai siapa yang lebih di antara yang lain, tetapi itulah yang terjadi mengenai bagaimana organisasi Islam Indonesia berbicara tentang sebuah realitas dalam wacana “Identitas Islam Indonesia” yang sudah terlanjur menjadi ada, baik dalam tataran verbal maupun konseptual, dalam wujud visual maupun sosial, dalam pemahaman maupun pemikiran masyarakat Islam Indonesia. Jadi pengertian ada dalam hal ini sebenarnya adalah persoalan siapa yang mengadakan. Semua kesimpulan diserahkan kepada pembaca, yang tentu saja dengan cara dan kesadaran sejarah yang mereka miliki, yang diperoleh melalui proses yang sangat mungkin berbeda-beda pula.

Perbedaan pemahaman, pemikiran dan sikap di antara komunitas-komunitas Islam Indonesia dalam menanggapi wacana tentang “identitas” adalah menggambarkan identitas kesejarahan mereka. Bagaimana cara mereka memahami realitas adalah hasil dari proses sejarah yang mereka lalui, termasuk cara bagaimana mereka melakukan identifikasi diri. Pengetahuan apapun yang mereka produksi melalui upaya identifikasi diri adalah sesuatu yang berharga sebagai fase awal dari proses penemuan konsep diri secara merdeka dan otonom, bukan konsep diri reaksioner yang terbangun dalam konteks inferior melawan superior.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, “Adat dan Islam: Tela’ah Mengenai Konflik di Minangkabau”. dalam Ahmad Ibrahim et. al. *Islam di Asia Tenggara Pespektif Sejarah*, Jakarta: L3ES, hlm.193-211, 1989.
- Abdullah, Taufik dan Abdurraman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi*, Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Adam, Asvi Warman, Pengantar: “Sejarah Lisan di Asia Tenggara, Sejarah Korban di Indonesia” dalam P. Lim Pui Huen et. al., *Sejarah Lisan di Asia Tenggara teori dan Metode*, Jakarta: LP3ES, hlm. xii-xxiii, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.
- Azra, Azyumardi, *Renaisans Islam di Asia Tenggara; Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- De Graaf, H.J.& TH.Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, (terj.) Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti dan KITLV, 1985.

- Gandhi, Leela, *Postcolonial Theory A Critical Introduction*, Allen&Unwin Atchison Street St.Leonards NWS 2065, Australia, Singapore: Printed by KHL Printers, 1998.
- Geertz, Clifford, *Tafsir Kebudayaan* (Terj.), Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Drewes, G.W.J “Pemahaman Baru tentang Kedatangan Islam di Indonesia”, dalam Ahmad Ibrahim et. al. *Islam di Asia Tenggara Pespektif Sejarah*, Jakarta: L3ES, hlm. 7-36.
- Hurgronje, C. Snouck, “Ulama Jawa yang Ada di Mekkah pada Akhir Abad-19”, dalam Ahmad Ibrahim et. al. *Islam di Asia Tenggara Pespektif Sejarah*, Jakarta: L3ES, hlm. 142-160, 1989.
- Ibrahim Alfian, “Ulama dan Masyarakat Aceh” dalam Ahmad Ibrahim et. al. *Islam di Asia Tenggara Pespektif Sejarah*, Jakarta: L3ES, hlm.193-211. 170-178, 1989.
- Kuhn, Thomas, *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- Milner, A.C., “Islam dan Martabat Raja Melayu, dalam Ahmad Ibrahim et. al. *Islam di Asia Tenggara Pespektif Sejarah*, L3ES, Jakarta: hlm. 48-71, 1989.
- Norris, Christopher, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida* (terj.. Inyiak Ridwan Muzir, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.
- Spivak, Gayatri, ‘Can The Subaltern Speaks?’ reprinted in *Marxist Interpretation of Culture*, eds Cary Nelson & Laurence Grossberg, Macmillan Education Basingstoke, pp 271-313, 1988 (1985).
- Winstedt, R.O. “Kepercayaan dan Agama Orang Melayu” dalam Ahmad Ibrahim et. al, 1989, *Islam di Asia Tenggara Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, Hlm.161-169, 1989.

#### **Informan sumber:**

1. Agung Danarto : PW Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Tasman Hamami : PW Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Machasin : PW Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Nizar Ali : PW Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Shobbarin Syakur : Markaz Pusat Majlis Mujahidin Indonesia
6. Tindyo Prasetyo : DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Yogyakarta

\*Penulis adalah Dosen Sejarah Kebudayaan Islam, Fak Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

